

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BATUBI KABUPATEN NATUNA

¹Supardi, ²Kustiawan, ³Ardi Putra

^{1&2} Pogram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email:

¹mrsupardi12321@gmail.com

²kustiawan@umrah.ac.id

³ardiputra@umrah.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Stunting merupakan suatu permasalahan gizi kronis yang bisa mengakibatkan kurangnya asupan gizi dalam renggang waktu panjang sehingga mengakibatkan seorang anak terganggu pertumbuhannya. Stunting juga salah satu penyebab anak cenderung pertumbuhan tinngi badan terganggu atau kerdil dibandingkan tinggi badan anak-anak diusianya. Di Desa Samedang sendiri prevalensi stunting 25% dari 40 anak-anak yang mana 10 anak dinyatakan stunting, bahkan menjadi desa dengan kasus stunting terbanyak di Kecamatan Bunguran Batubi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program desa dalam penanganan stunting di Desa Samedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menggunakan teori implementasi dari Sumaryadi yaitu adanya suatu program, target group (masyarakat), dan unsur terkait. Yang mana dalam program sudah berjalan semana mestinya namun anggaran masih belum transparan sehingga anggaran yang ada masih bersifat penyuluhan dan bukan anggaran pencegahan. dan program ada yang belum efektif untuk pemeberian gizi terhadap anak masih belum optimal. Untuk kesimpulan harusnya dalam sebuah program ada kerjasama pada unsur terkait yan memahami tentang program tersebut agar pengimplemtasiannya bisa berjalan dengan baik dan terstruktur.

Kata Kunci: Program; Target Group (masyarakat); dan Unsur Terkait.

Abstract

Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction which is used as a legal umbrella for the National Strategy which has been implemented since 2018. Stunting is a chronic nutritional problem that can result in a lack of nutritional intake in a long period of time, resulting in a child impaired growth. Stunting is also one of the causes of children tend to grow in body growth disturbed or stunted compared to the height of children at their age. In Samedang Village alone, the prevalence of stunting is 25% of 40 children, of which 10 children are declared stunted, even becoming the village with the most stunting cases in Bunguran Batubi District. For this reason, this study aims to determine the implementation of village programs in handling stunting in Samedang Village. This research uses a qualitative descriptive approach by making observations, interviews, and documentation. The results of the research use implementation theory from Sumaryadi, namely the existence of a program, target group (community), and related elements. Which in the program has been running as it should but the budget is still not transparent so that the existing budget is still counseling and not a prevention budget. And there are programs that have not been effective for providing nutrition to children are still not optimal. For conclusion, there should be cooperation in a program related elements that understand the program so that its implementation can run well and be structured.

Keywords: Program; Target Group (community); and Related Elements.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya, Indonesia atau instansi pemerintah dibuat dikarenakan adanya masyarakat dan untuk melayani masyarakat yang dimana salah satunya adalah dalam hal kesehatan yang telah tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal pelayanan dari kesehatan merupakan pelayanan yang mendasar bagi pemerintah untuk memberikan layanan seperti: pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok, dan Pendidikan dasar kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam hal pelayanan dikarenakan masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan tersebut.

Indonesia sendiri angka stunting terbilang masih cukup tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Angka stunting di Indonesia mencapai angka 24,4% yang dimana jumlah itu dinilai cukup tinggi, sehingga dibutuhkan Strategi Nasional (StraNas) dalam menangani permasalahan ini. Peran pemerintah dalam mengurangi angka stunting dibuktikan dengan adanya RPJMN pada periode 2020-2024 dimana

pemerintah mengupayakan penurunan stunting bisa mencapai 14%. (Sekretariat wakil Presiden, TP2AK).

Salah satu pilarnya yaitu konvergensi program pusat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke pemerintahan desa, konvergensi bagi desa sendiri akan terstruktur dalam sebuah kebijakannya agar bisa terkoordinir dengan baik sehingga target yang dicapai adalah masyarakat desa dalam penanganan stunting. selain desa yang berperan aktif dalam penanganan atau mengkoordinasi berbagai pihak adalah Bappeda yang mana lembaga ini sebagai satu coordinator penting untuk penurunan stunting bahkan juga mencangkupi hal anggaran dalam penurunannya (Permanasari et al., 2020). Stunting adalah permasalahan gizi pada balita dibawah usia 5 tahun, diakibatkan kesehatan gizi yang tidak mencukupi sehingga pertumbuhan balita cenderung kerdil/pendek. Didalam sunia kedokteran atau kesehatan balita dinyatakan stunting atau baru kelihata setelah umur balita telah mencapai pada usia 2 tahun. Masalah mengenai stunting ini juga adalah permasalahan yang paling krusial dalam dunia kesehatan , bahkan menjadi permasalahan serius dalam negara berkembang maupun negara maju.

Stunting sendiri bisa diartikan sebagai kondisi pertumbuhan anak yang dimana terjadi gangguan pada tumbuh kembang anak dan pada system kerja otak anak diakibatkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama, hal demikian yang membuat pertumbuhan anak menjadi terganggu, seperti lambatnya pertumbuhan tinggi anak sehingga anak cenderung lebih pendek daripada anak yang normal diusianya.

Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah stunting melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting, yang diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitif di antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap stunting, seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan

keluarga. Penanggulangan stunting perlu kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. (Suhada et al., 2018). Untuk mencegah masalah stunting dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat dan aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pelaksana ujung tombak. Selama ini penanganan masalah stunting belum bisa dikatakan berhasil seutuhnya masih banyak hambatan karena pembagian kerja setiap OPD masih belum memahami dan masih kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak yang mbelum mengerti secara keseluruhan dari penanganan stunting baik dari instansi dan masyarakat. Hal ini dikarenakan terlambatnya informasi yang diperoleh, terputusnya informasi sosialisasi, para instansi yang datang saat sosialisasi, dan keadaan wilayah yang sulit menjadi salah satu penyebab untuk beberapa daerah tertentu (Susanti & Mardhiah, 2022).

Stranas Stunting disusun berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman Indonesia dan global terkait dengan upaya pencegahan stunting. Stranas Stunting bertujuan untuk memastikan

agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun). Stranas Stunting disusun agar semua pihak di semua tingkatan dapat bekerja sama untuk mempercepat pencegahan stunting (Satriawan. Elan, 2018).

Pencegahan stunting telah dijadikan prioritas nasional agar generasi muda di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting sebagai panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan stunting. Stranas stunting mencakup upaya perbaikan gizi melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan untuk mengatasi masalah terkait gizi secara langsung lewat sektor kesehatan. Sedangkan intervensi gizi sensitif berusaha menanggulangi masalah non-kesehatan yang berkontribusi pada stunting, seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan,

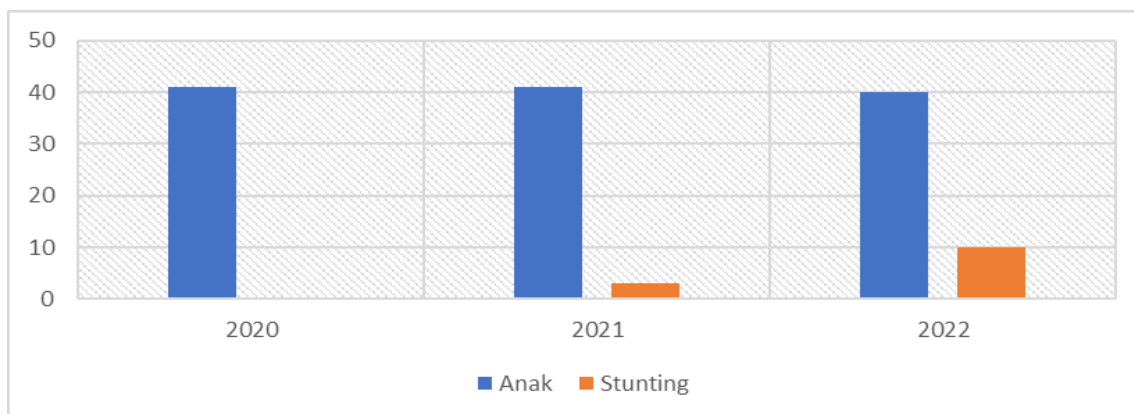
jaminan kesehatan, dan sebagainya. (Tanoto Foundation, 2021).

Pemerintah telah menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas sektor di berbagai tingkatan sampai dengan tingkat desa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk bisa menyusun berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program penurunan stunting terutama yang bersifat skala desa melalui pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dalam program desa bisa saja mengurangi angka stunting di setiap desa, kebijakan desa sangat penting untuk menanggulangi angka stunting walaupun di puskesmas juga bersosialisasi mengenai stunting namun peran atau kebijakan dari desa lah yang penting untuk penurunan angka stunting, seperti kebijakan posyandu yang melibatkan masyarakat untuk sadar akan resiko stunting. Hal ini dikarenakan strategi nasional untuk saling melengkapi agar

program-program yang di rancang bisa mencapai tujuan.

Gambar 1.1 Data Stunting Desa Semedang 2020-2022



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Dalam gambar grafik diatas, jelas terlihat anak yang mengalami meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2022 masih 0 anak, terjadi peningkatan pada tahun 2021 yaitu berjumlah 3 anak. Pada tahun 2022 kasus stunting di Desa Semedang meningkat secara drastis yaitu sebanyak 10 anak dari total 40 anak yang ada di Desa Semedang.

Di desa yang akan diteliti memiliki permasalahan stunting yang paling tinggi diantara desa lain di kecamatan Bunguran Batubi, dimana di Kecamatan Bunguran Batubi ada 5 desa yaitu Gunung Putri, Batubi Jaya, Sedarat Baru, Sedanau Timur, dan Semedang. Desa Semedang inilah penduduk paling sedikit dan kasus stuntingnya semakin banyak dari pada desa lain. Walaupun angka kelahiran di desa Semedang nomor 3 diantara desa

lain namun permasalahan stunting masih saja dipermasalahkan.

Suatu program perlu adanya suatu tindakan atau sebuah pelaksanaan yang bisa membuat program tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Apalagi suatu program mempunyai dasar atau lebih tepatnya terstruktur agar suatu pelaksanaan mempunyai jaminan dalam melaksanakan fungsinya, baik dalam program bahkan pelaku dalam pelaksanaannya. Seperti halnya dari kasus yang akan diteliti ini, yang mana kasus stunting di Desa Semedang sangat dipertanyakan dikarenakan meningkat secara drastis yang mana suatu gambaran tersebut bisa dipertanyakan halnya apakah suatu pelaksanaan program yang dijalankan masih ada kendala atau ada sebuah hal tertentu yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan perlunya

dipahami bahwa suatu program institusi pemerintahan di Desa Semedang, dilaksanakan untuk mencapai suatu Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten target, hal stunting ini contohnya Natuna. Dalam pengumpulan data penulis program dilakukan untuk menekan angka melakukan wawancara dengan Kepala stunting namun dalam pelaksanaannya Desa, Kader Posyandu, dan masyarakat Desa Semedang serta melakukan masih belum mencapai targer tersebut. Desa Semedang serta melakukan

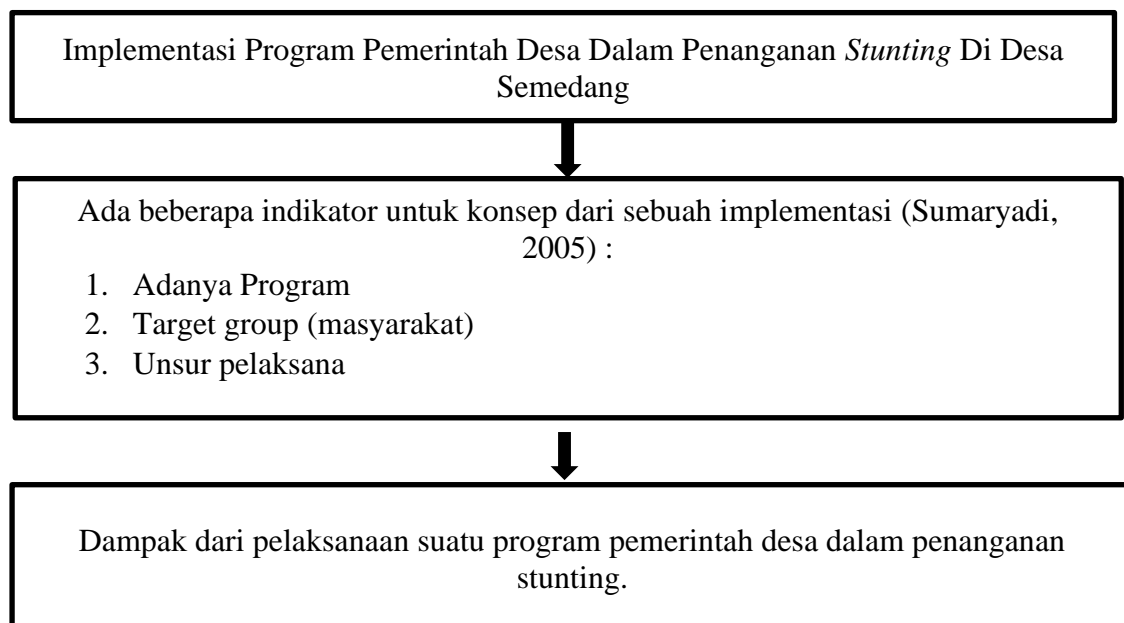
Maka dari itu peneliti ingin observasi dan dokumen. Pengumpulan mengetahui Bagaimana Pelaksanaan observasi, penulis melakukan Program Pemerintah Desa dalam pengamatan yang terjadi di dalam Desa Penanganan Stunting di Desa Semedang, untuk pencegahan stunting. sehingga peneliti mengkaji pelaksanaan Pengumpulan dokumen bersumber dari program pemerintah desa dalam RKP Desa, buku, jurnal, media massa penanganan stunting di desa Semedang. online, dan berupa gambar-gambar pendukung.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode maka analisis dilakukan dengan analisis pendekatan kualitatif yang mampu data induktif yaitu penarikan kesimpulan menjelaskan bagaimana aktor informal dari pengumpulan data-data. mampu mempengaruhi sistem kerja dan

observasi dan dokumen. Pengumpulan observasi, penulis melakukan pengamatan yang terjadi di dalam Desa untuk pencegahan stunting. Pengumpulan dokumen bersumber dari RKP Desa, buku, jurnal, media massa online, dan berupa gambar-gambar pendukung. Setelah data dikumpulkan maka analisis dilakukan dengan analisis data induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pengumpulan data-data.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Dalam sebuah implementasi atau pelaksanaan bisa saja gagal dalam sebuah penerapannya yang mana ada beberapa faktor yang tidak memenuhi syarat, seperti hal tersebut tidak bisa digapai atau tidak sesuainya rencana awal, tidak adanya suatu kerjasama sehingga menghambat suatu pelaksanaan, atau bisa saja dalam hal tidak memahami atau menguasai suatu permasalahan dalam sebuah pelaksanaan sehingga terjadi kegagalan implementasi atau pelaksanaan (unsuccessful implementation) (Sumaryadi, 2005).

Dalam upaya untuk mencapai suatu keberhasilan dari imlementasi maka diukur dalam bentuk variabel atau satu faktor yang bisa membuat implementasi tersebut berjalan dengan baik. Suatu variabel atau faktor tersebut haruslah saling berhubungan satu sama lain agar suatu implementasi atau pelaksanaan berhasil. Model implemetasi ini merupakan suatu model pelaksanaan atau operasional yang mampu menjelaskan dari hubungan hingga suatu variabel kebijakan dalam pelaksanaan (Sumaryadi, 2005) .

Definisi konsep implementasi (Sumaryadi, 2005) dimana ia menyatakan

bahwa ada 3 unsur penting dalam implemetasi:

Adanya suatu program yang dilaksanakan, dengan adanya program maka sebuah pelaksanaan bisa dilakukan dengan baik dan terstruktur dikarenakan perlunya adanya acuan untuk sebuah pelaksanaan. Program dilaksanakan adanya tujuan yang mendasari dikarenakan adanya suatu program maka sudah ada target tertentu agar program tersebut bisa dijalankan sesuai standard dari pelaksanaan suatu tujuan.

Target group (masyarakat), dimana dijadikan sebagai sasaran dalam hal menerima manfaat dari pelaksanaan, dalam hal ini ialah masyarakat dikarenakan target dalam pelaksanaan program stunting agar tersampaikan dengan baik. Dalam artian bahwa masyarakat menerima manfaat dari suatu pelaksanaan program yang telah disetujui dikarenakan masyarakat lah tujuan dari suatu pembuatan sebuah program apalagi di suatu desa.

Unsur pelaksana (implementor), yang dimana yang membuat suatu program yaitu desa dan intansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap program stunting. Hal ini seperti instansi apa saja yang terlibat dalam hal ini,

dikarenakan suatu instansi harus sesuai dengan program yang akan dijalankan missal untuk stunting maka instansinya adalah puskesmas atau dinas kesehatan yang menaunginya, dan di desa diturunkan suatu lembaga atau kader yaitu posyandu. Unsur pelaksana inilah yang akan menjadi pelaksana dan bertanggungjawab atas segala kemungkinan yang akan terjadi selama di lapangan, sehingga satu instansi ke instansi harus adanya kerjasama dan memiliki satu visi dan misi yang akan dijalankan supaya dalam penanganan stunting bisa ditangani dengan serius oleh setiap instansi apalagi di pemerintahan.

Mengenai tentang program pemerintah maka tidak akan jauh dalam aspek dari kebijakan dikarenakan program yang dibuat pemerintah ialah satu kebijakan yang mana wajib dijalankan. Program atau kebijakan adalah yang mana prinsip yang diterapkan "whatever government choose to do or not to do" (Dye, 2016) . Dimana program atau kebijakan sebagai instrument penting bagi pemerintahan, kebijakan bisa berupa aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana akan berisi hal yang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mencapai sebuah

tujuan yang terkait kebijakan apa yang akan dilakukan.

Tujuan mengenai program atau kebijakan merupakan tindakan dari pemerintah yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai landasan untuk pelaksanaan pemerintah, agar bisa membuat lebih terstruktur dalam mejalankan tugasnya (Sahya Anggara, 2014). Dikarenakan pemerintah adalah lembaga penggagas dan penggerak bagi suatu program atau kebijakan yang telah dibuatnya untuk pelaksanaan suatu program yang telah di rancang. Dalam suatu program yang dirancang perlu adanya tanggungjawab penuh mengenai kebijakan tersebut melalui pemerintah yang bekerja sama terhadap instansi yang berkaitan dalam bidangnya, karena pada umumnya hal tersebut dirancang untuk masyarakat.

Dalam hal program pemerintah haruslah adanya peran dari masyarakat baik sebagai pemberi inspirasi dan juga sebagai penerima dari program tersebut. Menurut Hart 1992 partisipasi dari masyarakat adalah yang penting dalam merumuskan suatu program atau kebijakan yang akan diambil dalam pemerintahan yang mana sebagai suatu proses yang wajib untuk di diskusikan

oleh pemerintah dengan masyarakat agar bisa memberikan dampak langsung terhadap masyarakat (Setiawan, 2022). Hal ini dipertegas dengan hal pemerintah sebagai acuan untuk menjalankan program agar lebih baik dan partisipasi adalah hal yang menjadi hak bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi untuk pelaksanaan kebijakan agar lebih baik.

Dalam program pemerintah haruslah bekerja sama dengan instansi terkait seperti halnya stunting, pemerintah desa akan bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk hal pemeriksaan dan lain sebagainya. Pemerintah telah membuat suatu langkah untuk kebijakan dalam menekan angka stunting yang mana angka stunting di Indonesia sendiri meningkat setiap tahun (Rahmadhita, 2020). Sehingga, pemerintah akan membuat suatu kebijakan yang dimana meminta pihak terkait untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan program dari penekanan angka stunting ini, hal ini juga sudah dibahas melalui rapat yang dipimpin langsung oleh TP2NK pada 2017 agar program untuk menurunkan angka stunting bisa mencapai target untuk setiap tahun yang akan datang.

Ada beberapa faktor dalam pelaksanaan suatu program, menurut Edward (dalam Roeslie & Bachtiar, 2018) ada 3 hal yang bisa membuat suatu program atau kebijakan bisa berjalan dengan baik. Yaitu:

Komunikasi, suatu hal yang penting dikarenakan komunikasi adalah hal penyambung penyampaian dari pemerintah sampai ke masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa ada 3 hal yang penting dalam komunikasi yaitu transpormasi (penyampaian dari pemerintah selaku pembuat suatu program ke pada instansi terkait hingga masyarakat), kejelasan (suatu penyampaian suatu program harus jelas sehingga tidak disalah artikan bagi instansi terkait maupun masyarakat), dan konsistensi (jika suatu program yang dirancang pemerintah, maka dalam menjalankan program harus sesuai prosedur dan suatu kebijakan tersebut tidak ada sangkut paut dengan program lainnya).

Disposisi, suatu kebijakan haruslah bersifat tertulis dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun dan perlu adanya insentif dalaam pelaksanaannya.

Sumber daya, dalam hal ini sebagai pendukung dalam pelaksanaan program

seperti SDM yang berkualitas dalam menjalankan program, anggaran yang bisa mendukung dalam segi pelaksanaan program, dan fasilitas untuk wadah untuk melaksanakan program atau kebijakan yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stunting adalah suatu hal yang sangat penting untuk ditangani, dikarenakan menjadi suatu prioritas nasional dan bahkan menyangkut kualitas sumber daya manusia agar sehat dimasa akan datang. Stunting pada seorang anak bisa mencerminkan suatu kondisi dimana balita gagal tumbuh pada masa usia yang telah ditentukan atau tumbuh kembang balita tidak sesuai dengan umur serta pekembangannya yang dialami oleh anak tersebut.

Stunting juga merupakan suatu kondisi yang mana anak yang berada dibawah umur 5 tahun tumbuh kembang yang dialami anak dikarenakan gizi anak mengalami kekurangan, sehingga mengakibatkan gizi kronis dalam suatu periode pertama yaitu pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Oleh sebab itu, stunting sangat beresiko pada anak balita yang mana bisa terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, sehingga kerentanan yang

dialami anak/balita terhadap penyakit ini bisa dikatakan sangat cepat baik dari segi pertumbuhan ataupun perkembangan dimana hal tersebut akan terjadi secara signifikan terhadap balita yang mengalaminya.

Desa Semedang menjadi desa yang memiliki tingkat perkembangan stunting paling tinggi di Kecamatan Bungurung Batubi, yang mana perkembangan stunting yang meningkat drastis yang terjadi pada rentang waktu yang sangat singkat, dimana dari 0 balita yang mengalami kasus stunting pada tahun 2020 dan 2021 langsung melonjak naik menjadi 10 balita yang mengalami kasus stunting pada tahun 2022 menurut data yang dikeluarkan KEMENKES sesuai dengan data yang dilaporkan dari masing-masing pukesmas daerah sesuai dengan Bulan Penimbangan (BIAN) yang telah dilakukan yaitu di bulan Agustus tepatnya. Hal ini menjadi fokus masalah yang harus di tangani dengan cepat baik itu dari segi pencegahan maupun penanganannya.

Kebijakan penanganan masalah stunting di Kabupaten Natuna sendiri telah dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penurunan Stunting di

Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan disetiap instansi pemerintahan kecamatan sampai ke desa khususnya Desa Semedang, dimana hal tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja Panjang (RKP) Desa Semedang. Implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Semedang, dimana peneliti melihat dari 3 (tiga) fenomena penanganan stunting di Desa Semedang

Adanya Suatu Program

Program penanganan stunting di Desa Semedang terdiri dari berbagai macam. Program-program tersebut yaitu berupa program dengan berlandaskan visi dan misi pemerintah Desa Semedang yaitu dengan “Mewujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera” yang meliputi seluruh program kesehatan yang ada di Desa Semedang yang salah satunya penanganan Stunting dimana dilihat dari kerjasama antar pihak secara langsung maupun tidak langsung. Program penanganan masalah stunting dimiliki oleh setiap pemerintah daerah bahkan sampai pada pemerintah Desa, dimana dapat diketahui bahwa setiap lembaga memiliki program sesuai dengan bidang keahlian dan tupoksinya masing-masing. Program-program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Semedang dan juga bekerjasama kepada pihak

puskesmas diantaranya meliputi, peningkatan pengetahuan gizi masyarakat dengan cara sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi ini telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yang pertama dilakukan oleh pihak Puskesmas dan pihak Dinas Kesehatan dan yang kedua dilaksanakan oleh pihak Desa Semedang beserta Kader Posyandu dan Puskesmas.

Selain itu, penyediaan PMT balita dan ibu hamil khusus balita yang mengalami stunting. Penyediaan ini sudah disediakan oleh pihak Kader Posyandu yaitu melalui Kader Amore untuk peralanan anak-anak yang dilakukan satu bulan satu kali dan Kader Posbindu untuk ibu hamil yang dilaksanakan setiap bulannya sampai pasca kelahiran.

Kemudian, gerakan Masyarakat (GERMAS), yang dilakukan seperti penyuluhan setiap bulan oleh pihak Posyandu dan menjadikan satu media promosi agar ibu-ibu memahami apa itu stunting yang telah dilaksanakan satu bulan satu kali.

Sanitasi Pedesaan yaitu melakukan pengecekan dengan cara door to door atau dari rumah ke rumah masyarakat terkhusus anak balitanya mengalami stunting dilakukan 3 bulan sekali dalam satu tahun.

e. Edukasi-eduksi Gizi Seimbang yang mana untuk memberi tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai masalah stunting yang dialami saat ini yang dilakukan 2 kali sebulan dalam satu tahun.

Pemanfaatan Dana desa sebagaimana mestinya, hal ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan atau jumlah kasus stunting yang ada Di Desa Semedang dalam jangka 1 tahun.

Program-program lainnya sebagai penunjang baik dalam pencegahan maupun penanganan masalah stunting, seperti pembuatan dapus sehat agar anak-anak bisa mendapatkan gizi lebih dan bisa mengurangi jumlah stunting di Desa Semedang.

Adapun program yang dilakukan oleh pihak pukesmas yaitu salah satunya edukasi gizi, baik itu melalui penyuluhan atau penyempian secara langsung pada ibu hamil atau orang tua serta dengan pemberian PMT ibu hamil dan balita yang mengalami stunting, edukasi gizi juga merupakan salah satu dalam pelaksanaan program penanganan stunting yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bergizi melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya peningkatan

gizi anak balita, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita/anak. Edukasi gizi ini sendiri yaitu salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh tenaga ahli gizi serta kader posyandu, dimana bertujuan untuk menciptakan masyarakat Desa Semedang yang sadar akan suatu kebutuhan gizi balita/anak yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan.

Tabel 4.2 Jenis Bantuan Gizi Anak

No.	Jenis Bantuan Gizi	Jumlah
1	Susu Zee Bubuk 350 g	1 Kotak
2	Susu Indomilk Cair 150 ml	5 Kotak
3	Telur	15 Butir
4	Vitamin Sacatonik 100 ml	1 Kotak
6	Cucurmaplus 120 ml	1 Kotak
7	Nasi+ayam+sayur+buah	1 Kotak

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Pada tabel diatas merupakan bantuan dari Desa Semedang kepada anak-anak yang dinyatakan stunting sekaligus memberikan gizi kepada anak agar pertumbuhan mereka berjalan dengan baik. Bantuan yang diberikan desa ini dilakukan 1 tahun sekali seperti bantuan susu zee, telur, vitamin sacatonic, dan vitamin curcumaplus. Sedangkan bantuan seperti susu kotak indomilk dan nasi+ayam+sayur+ buah diberikan sebula sekali melalui pihak Posyandu, bantuan ini diberikan kepada seluruh anak-anak yang berada di Posyandu.

Target Group (Masyarakat)

Perilaku kelompok sasaran (Target grup) dimana adanya respon positif dan respon negatif dalam segi sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi program penanganan stunting di Pemerintah Desa Semedang, hal ini ditunjukkan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat yang anaknya terdampak kasus stunting. Dalam hal ini, masyarakat menerima manfaat dari program pemerintah yang sudah diterimanya dan mengetahui program-program yang telah dilakukan oleh desa, yang mana kelompok sasaran adalah bagian terpenting dalam pencapaian suatu program.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap anak yang terdampak stunting, maka ditemukan bahwa kelompok sasaran tersebut merespon baik dan positif mengenai penanganan stunting. Dapat dilihat dari anak yang sebelumnya terdampak kasus stunting sudah kembali ceria dan aktif serta dapat berbaur dengan teman sebayanya untuk bermain. Selain itu juga masyarakat sangat antusias dalam melakukan posyandu setiap bulannya, selain dilakukannya pemeriksaan terhadap anak juga dilakukan sosialisasi untuk menambah

pengetahuan dalam penanganan masalah stunting dan edukasi-edukasi yang berkaitan dengan gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik dilakukan oleh puskesmas setempat yang dibantu oleh pihak kader dan didukung oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi peneliti sudah sesuai dengan penjelasan indikator perilaku kelompok sasaran yang telah dilakukan.

Unsur Pelaksana

Pemerintah Desa

Desa Semedang menjadi Desa yang memiliki angka balita stunting yang tertinggi di antara 5 (lima) Desa yang berada di Kecamatan Bunguran Batubi, setelah Desa Sedarat Baru, masalah stunting dapat diketahui melalui bulan penimbangan yang dilakukan pada bulan Agustus, dimana khusus Desa Semedang sendiri terdapat 10 orang anak balita yang mengalami stunting yang salah satu penyebabnya yaitu masalah gizi kronis.

Untuk program-program dalam penanganan stunting ada beberapa sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena koordinasi yang kurang terhadap pemerintah desa, kader posyandu dengan pihak pukesmas yang dapat dilihat masih banyak masyarakat yang kurang peduli

dalam penanganan stunting dan penegetahuan mengenai penanganan stunting serta pola asuh anak dan juga adanya penganggaran untuk stunting, tapi hal tersebut bukan termasuk kedalam pendanaan khusus dalam penanganan stunting, pendanaan tersebut masih bersifat menyeluruh. Dalam penanganan stunting ini, menurut peneliti akan lebih baiknya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa, pukesmas dan kader dengan baik, agar dalam melaksanakan program-program untuk penanganan stunting ini berjalan dengan optimal, untuk pendanaan akan lebih baiknya dalam penanganan stunting ini diperlukan dana yg khusus, karena mengingat stunting merupakan masalah yang sangat penting untuk ditangani, agar anak-anak yang mengalami stunting bisa pulih kembali seperti anak yang lainnya.

Kader Posyandu

Untuk pendanaan masalah stunting ini, kami dari pihak kader telah mengajukan kepada pihak pemerintah desa, yang mana untuk dana khusus penanganan stunting ini kami meminta agar pendanaan tersebut dipisahkan dengan dana yang lainnya atau secara tersendiri, kerana hal tersebut akan memudahkan kami pihak kader untuk

melakukan penanganan masalah stunting, sehingga penanganan masalah tersebut bisa berjalan dengan optimal dan juga di sejalkan dengan program-program yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan terkhusus program dari pemerintah desa., akan tetapi hal tersebut masih kurang dipedulikan oleh pemerintah desa itu sendiri, dimana kami dari pihak kader hanya di beri tugas dari pemerintah desa untuk menjalakan program-program dalam penanganan stunting saja, dikarenakan dana tersebut langsung dikelola oleh pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa (DD) , dimana pemerintah desa juga bekerjasama dengan kami kader posyandu, yang mana ikut terjun langsung ke lapangan dalam pembagian makanan tambahan dan melakukan gerakan masyarakat serta sosialisai yang dilakukan oleh pihak kesehatan, sedangkan untuk program dari pihak pukesmas untuk pendanaannya kami dari kader posyandu kurang tahu, kami hanya membantu dalam menjalankannya supaya dalam penangangan masalah ini berjalan dengan baik dan optimal nantinya.

KESIMPULAN

Dari program-program diatas dilakukan sebagaimana mestinya, dan sudah dianggarkan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sehingga program yang telah dijalankan pada 2022 dan dinyatakan berhasil dikarenakan sudah diimplementasikan di kalangan instansi pemerintah desa dan masyarakat, seperti yang diteorikan oleh Sumaryadi (2005) bahwa program yang dilaksanakan di Desa Semedang telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai seperti masalah anggaran. Anggaran yang ada di Desa Semedang masih bersifat penyuluhan, yang mana belum ada anggaran yang berupa pencegahan. Sehingga, lambatnya penurunan stunting yang ada di Desa Semedang. Dalam bantuan untuk stunting masih minim dikarenakan bantuan yang diberikan hanya 1 tahun sekali, walaupun bantuan lainnya dari kader ada didalam pengecekan posyandu. Namun, bantuan tersebut masih belum efektif seperti yang disampaikan oleh pihak puskesmas bagian gizi “didalam hal pencegahan bisa dilakukan seperti pembuatan dapur sehat yang memberikan makanan kepada anak 4x dalam sebulan”.

Dalam program desa ini, sosialisasi sudah diberikan baik di desa sendiri maupun di dalam posyandu dan hal lainnya mengenai keseriusan desa dalam penanganan stunting dilihat dari desa membuat sebuah Rencana Kerja Panjang (RKP) Desa Semedang yang mana tertuang juga dalam RPJMDes.

Selanjutnya, taarget group (masyarakat). Didalam keadaan masyarakat sendiri masih kurangnya pengetahuan mengenai program stunting karena sebagian masyarakat menganggap anak yang stunting masih bersifat keturunan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat walaupun sudah diberikan sosialisasi secara berkala oleh pihak puskesmas dan pihak posyandu. Untuk bantuan kepada masyarakat khususnya anak stunting sudah ada yang diberikan khusus oleh desa dan juga dan pihak posyandu. Hal lainnya, mengenai program pemerintah desa sendiri sudah diberikan kepada masyarakat sehingga dalam implementasi program sudah dilaksanakan dengan baik.

Terakhir unsur Pelaksana khususnya dari pihak puskesmas sudah menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan penurunan stunting di Kecamatan Bunguran Batubi terutama di

Desa Semedang. Namun, ada beberapa hal yang belum terlaksana dikarenakan program Desa Semedang sendiri masih bersifat anggaran penyuluhan bukan berbentuk anggaran pencegahan.

Dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat sendiri sudah dilakukan secara berkala, bahkan dalam hal posyandu pihak puskesmas langsung turun tangan menanggapi dari hal menjaga gizi anak. Dalam program desa sendiri unsur pelaksana tidak terlibat langsung dalam penanganannya, oleh karenanya anggaran tersebut masih bersifat penyuluhan bukan pencegahan. Untuk kerjasama antara pihak Desa Semedang dan puskesmas itu tidak ada dikarenakan pihak puskesmas diturunkan langsung oleh Kementerian Kesehatan dan Desa Semedang sebagai unsur menjalankan tugas untuk membuat program desa.

REFENSI

Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Rasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. Media

Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 30(4).

Suhada, L., Penelitian, N. B., Pengembangan, D., Provinsi, D., Selatan, K., Dharma Praja, J., Perkantoran, K., & Kalsel, P. P. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia Stunting Prevention Policies In Indonesia. 13, 173–179.

Susanti, M., & Mardhiah, N. (2022). (2022) January-March Available online at. Journal of Social and Policy Issues, 2(1).

Satriawan. Elan. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tanoto Foundation. (2021). Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting.

Sumaryadi, N. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama.

Sahya Anggara. (2014). Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.

Setiawan, A. (2022). PEMERINTAH DESA (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa) (A. Khanafi, Ed.). Penerbit Deepublish.

- Kesehatan, J. I., Husada, S., & Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Stunting Problems and Prevention. Juni, 11(1), 225-229.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) Di Kota Depok Tahun 2018 Analysis Of Implementation Readiness Of Healthy Indonesia Program With Family Approach (Indicator 8: Mental Health) In Depok City 2018. In Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI (Vol. 07, Issue 02).